

provinsi di Pulau Papua menyiapkan pedoman teknis, dan mensosialisakannya kepada anggota masyarakat dengan lebih seksama. Hal ini dikarenakan MK dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A.7/2009 sudah memutuskan bahwa sistem noken adalah sah secara konstitusional.

2. Dengan mengingat kesulitan pembagian logistik antar dapil disarankan agar pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Papua.
3. Kepada pihak yang berwenang diharapkan lebih memperhatikan keamanan di Pulau Papua terutama dalam pelaksanaan pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Aprianto, Muhammad A. D. *Manajemen Kerja*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Guepedia, 2020).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- \_\_\_\_\_. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. (Jakarta: BPHN, 2012).
- Bintan, R. Saragih. *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana, 2017).

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Farid, Pustaka (ed), *Geomaritime Indonesia:Kajian Histori Sumber Daya dan Teknologi Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. (Bogor: Badan Informasi Geospasial, 2018).
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Cetakan ke-1 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000).
- Grasindo, Tim. *UUD 1945 dan Amandemennya : Untuk Pelajar dan Umum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Gramedia, 2023)
- Gunawan, Markus. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR,DPRD,&DPD)*. (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008).
- Hadi, Nuruddin. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2016).
- Hadi, Nuruddin. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2016).
- Harefa, Dermawan dan Fatolosa Hulu. *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Cetakan ke-1. (Banyumas: PM Publisher, 2020)
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Fokusmedia, 2020).
- Internasiona IDEA. *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Internasional IDEA, 2001).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: KENCANA, 2018).
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemilihan Umum di Indonesia: Tata Kelola Pemilu, Kedaulatan Rakyat, dan Demokratisasi*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2020).
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Cetakan ke-1. (Bandung: Binacipta, 1976).
- Labolo, Muhadan dan Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Mamudji, Sri. et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* .Cetakan Ke-6. (Jakarta : KENCANA, 2019).
- Roa, Hyronimus. *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri, 2015)
- Rusdiana, A. *Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Cetakan ke-1. (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD, 2021).
- Silalahi, Wilma. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Cetakan ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Sitabuana, Tundjung H. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).
- Soekanto, Soerjono. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

- Singkat*. (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- Suding, Sarifuddin. *Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014).
- Sukendar, Santoso Aris. et al. *Teori Hukum : Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Surbakti, Ramlan. *Didik Supriyanto dan Topo Santoso: Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Kemitraan, 2018).
- Thaib, Dahlan, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 (Perspektif Hukum Tata Negara)”, *Makalah yang disampaikan pada workshop Panwaslu se-Yogyakarta (Yogyakarta, 28-29 Mei 2004)*.
- Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*. Cetakan ke-1. (Malang: In-TRANS Publishing, 2009).
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar, 1962).
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Ke-1. (Jakarta: Timun Mas, 1960).

## B. Jurnal

- Abra, Emy Hajar. “Pemilu Serentak di Indonesia (Antara *Original Intent* dan Implementasi)”. *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*. No. 1 Tahun 2019
- Agustine, Oly Viane. “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional. *Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 8 No. 1 Tahun 2019.
- Azis, John. K, Irene. E. Sihombing. “Perbandingan antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Tertutup di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan yang Lebih Baik”. *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*. Volume 1 No. 2 Tahun 2023.
- F. Silalahi, Elisabeth dan Andina. E. P. Maharani. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Demokratis”. *Res Publika Jurnal Hukum Kebijakan Publik*. Vol. 5 No.2 Tahun 2021.
- Gunardi. “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dalam Penelitian Ilmu Hukum”. *Era Hukum*. Edisi No. 1 Tahun 2005.
- Hidayat, Arief. “Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis dan Berkarakter Pancasila: Sebuah Catatan Penting Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024”. *Dissenting Opinion* Pada tanggal 20 Maret 2024.
- Ikhlas, Al, Martin K dan Nana S. “Masalah Penelitian/ Research Problem; Pengertian Dan Sumber Masalah, Pertimbangan, Kriteria Pemilihan Masalah, Perumusan dan Pembatasan Masalah, Landasan Teori”. *Innovative: Journal of Social Science Research*. Volume 3 No. 2 Tahun 2023.

Jawa Pos Opini, Menyoal Nepotisme dalam Pemilihan Langsung, 3 Februari 2024.

Koran Kompas, “Ada Noken di Pemilu 2024”, Kamis, 1 Februari 2024.

Koran Nusantara, “Kisruh Sistem Noken di Papua Tengah”, 10 Februari 2024.

Kossay, Methodius. “Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)”. *jurnal penelitian* (Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2014).

Lukmajati, Dendy. “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)”. *Politika*. Volume 7 Edisi No. 1 Tahun 2016.

Mukhlis dan Muh. Yusri. “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Model Pembelajaran Berbasis Masalah”. *Sigma*. Volume 4 Edisi No. 2 Tahun 2012.

Mulyani, A. Tri, Heru Nuswanto dan Sukimin. “Sistem Noken di Provinsi Papua: Studi Putusan MK Nomor 47-81/PHPU.A.7/2009”. *Universitas Semarang*.

Persada, Achbar Madya. “Sistem Noken dalam Pemilihan Kepala Daerah di Papua (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/Php.Bup-XVI/2018)”. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Science, and Humanities*. Volume 1, Nomor 2 Tahun 2021.

Sidharta, B. Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. *Jentera*, “Rule of Law”. Edisi No. 3 Tahun 2004.

Sugiarto, wiwit P dan Marlina. “Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia”. Volume 5 No. 1 Tahun 2020.

Syuhada, Ootong. “Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya”. *Presumption of law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, Volume 3 No.1 Tahun 2021.

Yahuli, Rolin dan Tundjung H Sitabuana. “Model Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Papua Pegunungan”. *Universitas Negeri Semarang*. Volume 6, No.1 Tahun 2023.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilu

Indonesia, *Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib*

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2: PHPU.PRES-XXII/2024, *Dissenting Opinion*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A.VII/2009.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2014.

Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 810/PL.02.06/Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum.
- Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024.
- Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

#### **D. SUMBER INTERNET LAINNYA**

- Anonim, “Daftar Distrik, Kelurahan, dan Kampung di Papua Pegunungan”, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar\\_distrik\\_kelurahan\\_dan\\_kampung\\_di\\_Papua\\_Pegunungan](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_distrik_kelurahan_dan_kampung_di_Papua_Pegunungan), 18 Maret 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Yahukimo, “Luas Wilayah Kabupaten Yahukimo 2019-2021”, <https://yahukimokab.bps.go.id/indicator/153/78/1/luas-wilayah-kabupaten-yahukimo.html>
- Anonim, “Akses Darat Sulit Ditempuh, Transportasi Udara di Kabupaten Yahukimo Masih Dibutuhkan Hingga 25 Tahun Mendatang”, <https://nusantarainfo.com/transportasi/akses-darat-sulit-ditempuh-transportasi-udara-di-kabupaten-yahukimo-masih-dibutuhkan-hingga-25-tahun-mendatang/>, 9 April.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua, “Kabupaten Yahukimo”, <https://papua.bpk.go.id/kabupaten-yahukimo/>, 12 April.
- Hukum Online, “Membedah Putusan MK Soal Pemilu Serentak”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-putusan-mk-soal-pemilu-serentak-lt5ce3aaff452a7/>, 29 April.
- Hukum Online, “ Fungsi, Tujuan, Prinsip dan Asas-Asas Pemilu”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-pemilu-lt64956cc40a99a/>, 23 Juni 2023.
- KBBI, Permasalahan, <https://kbbi.web.id/masalah>, Database utama menggunakan KBBI daring edisi III.
- Sekretariat Jendral DPR-RI, “Pileg tak kalah penting disbanding Pilpres”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24458/t/Pileg>, 28 Maret 2019.
- Maksum Rangkuti, “Pengertian, Tujuan dan Tugas Lembaga Legislatif di Indonesia”, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tujuan-dan-tugas-lembaga-legislatif/>, 26 Agustus 2023.
- Anonim, “Sistem Noken dalam Pemilu”, <https://mh.uma.ac.id/sistem-noken-dalam-pemilu/>, 3 Februari 2024.
- Wikipedia, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo”,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Yahukimo](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Yahukimo), terakhir diubah 31 Maret 2024.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, “Sistem Pemilu 2024 tetap Proporsional Terbuka”,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2> , 15 Juni 2023.